

Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Sahala Purba¹, Michael Armando Panggabean², Tesalonika Br Purba³,
Enny Manalu⁴, Cindy Arsita Sitanggang⁵

Universitas Methodist Indonesia-¹Sahala824@gmail.com

Abstract-*The purpose of this study is to improve government performance and improve the final effectiveness of regional financial management. This research is quantitative descriptive research with the subject of information research. The data used in this study is the financial statements of the Regional Government of North Tapanuli Regency for 2013-2022. The results stated that the ratio of financial independence was very low at 10.43%, the ratio of financial dependence was very low at 8.91%, the ratio of the degree of fiscal decentralization was low at 10.63%, the ratio of effectiveness of PAD and the effectiveness of regional taxes was very efficient at 108.23% and 110.29%, the ratio of PAD efficiency and regional tax efficiency was very efficient at 2.45%, and the ratio of the degree of contribution of BUMD was good at 8.251%. Based on the analysis, the financial statements of the Regional Government of North Tapanuli Regency for 2013-2022 can be stated in general that North Tapanuli Regency has not been good enough in financial implementation and management. According to the results obtained, it can be concluded that the financial capability condition of the Regional Government of North Tapanuli Regency is still not ideal.*

Keywords: *Financial Statement Analysis; Financial Performance; and District Government.*

1. PENDAHULUAN

Tapanuli Utara adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang ibukotanya adalah Tarutung. Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara ini didirikan dengan UU Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang pada awalnya terdapat 5 wilayah yaitu Silindung, Toba Holbung, Humbang, Samosir, dan Dairi. Karena luasnya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, Tahun 1964 dilakukan pemekaran dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang ibukotanya berada di Sidikalang (Kabupaten samosir satahi- saoloan, 2024).

Pemerintah pusat mengesahkan UU RI No. 23 Tahun 2014 yang berhubungan dengan pemerintahan daerah dan UU RI No. 33 tahun 2004 sesuai perimbangan keuangan pemerintah daerah, 2014 pihak berwenang (Undang-undang Republik Indonesia, 2004). Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah lokal mampu memaksimalkan SDA yang dimilikinya, yang diikuti dengan hadirnya SDA berkualitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat setempat yang sesuai dengan pembangunan prasarana dan pelayanan pemerintah pusat. Tata kelola dalam pembangunan masyarakat yang ideal, dengan adanya pemecaran ini maka kemudahan pengendalian yang dilakukan para pelaku di daerah

dapat bersifat fleksibel. Jika dibandingkan dengan pemusatan maka pemerintah daerah diberikan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah dengan lebih efektif (Siswanto & Maylani, 2022). Dalam rentang 10 tahun, tingkat pengangguran cenderung merurun setiap tahunnya. Tingkat pengangguran terbuka Tapanuli tergolong rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara ini dikarenakan terbukanya lapangan kerja terkhusus di sektor pertanian dan UMKM. Tingkat kemiskinan di Tapanuli Utara juga mengalami penurunan, dikarenakan pemerintah membangun sektor pertanian, infrastruktur jalan, dan jembatan serta UMKM dan IKM. Modal kesuksesan dalam mencapai tujuan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah, yang dapat diterapkam sesuai kapasitas daerah dalam melaksanakan peran pemerintahan. Berikut adalah data PAD dan pendapatan transfer.

Tabel 1. PAD Dan Pendapatan Transfer

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan transfer
2013	37.954.419.661,95	761.663.073.336,00
2014	63.696.097.398,86	780.637.089.042,00
2015	82.753.547.210,86	1.034.436.635.991,00
2016	94.783.154.638,45	1.089.907.820.341,00
2017	162.441.906.093,04	1.055.355.673.355,00
2018	105.656.762.964,31	1.125.786.207.318,00
2019	113.990.753.581,35	1.124.312.757.921,00
2020	133.375.094.965,44	1.078.788.903.404,00
2021	162.791.620.432,20	1.178.811.365.743,00
2022	154.965.471.085,70	1.144.667.163.798,00

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

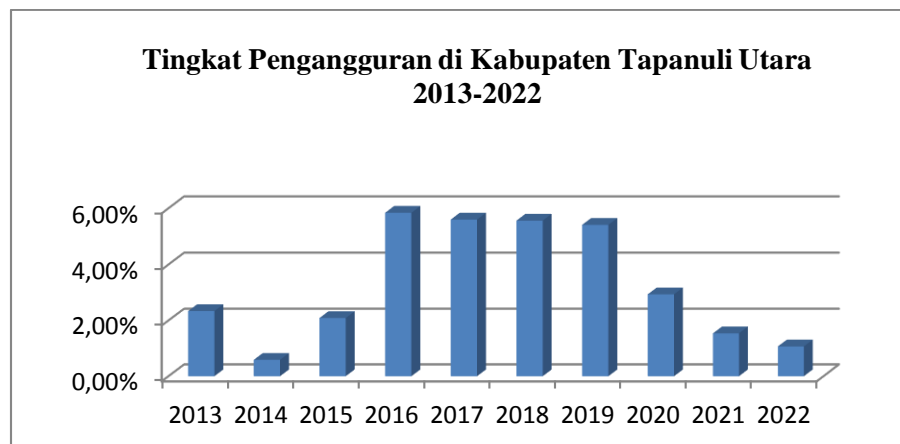
PAD merupakan pendapatan yang didapat dari daerah yang di temukan sesuai dengan Perpu guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan transfer yaitu pendapatan dari APBN atau APBD antar daerah guna pemerataan pendapatan disetiap daerah serta menutup celah fiskal dalam melaksanakan otonom daerah yang difokuskan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin bertambah atau lebih baik lagi. Semakin besar PAD dalam membangun daerah dan bisa bersaing dengan daerah lainnya dapat dilihat dari PAD untuk mendanai belanja daerahnya dan akan memberi dampak kepada pemberian transfer pusat-daerah yang cenderung menurun. Namun hal ini tidak terjadi pada Kabupaten Tapanuli Utara karena PAD cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017, begitu juga dengan pendapatan transfernya. Fenomena ini tidak sejalan dengan (Mardiasmo, 2018).

Tabel 2. Pengangguran Dan Tingkat kriminal

Tahun	Pengangguran	Tingkat Kriminalitas
2018	5,56	22,97
2019	5,41	37,37
2020	2,94	33,65
2021	1,54	36,63
2022	1,07	48,02

Sumber: (Bps.go.id, 2024)

Yang sering menjadi masalah yang ada dalam perekonomian disetiap negara miskin dan berkembang yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha mendapatkan pekerjaan. Tingkat kriminalitas adalah masalah sosial yang sering sekali terjadi, bahkan setiap negara memiliki tingkat kriminalitas tersendiri. Kriminalitas merupakan tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok yang melanggar hukum dan mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Salah satu pemicu terjadinya tindakan kriminal adalah pengangguran. Semakin bertambah Tingkat pengangguran semakin bertambah juga tingkat kemiskinan yang dapat berpengaruh terhadap kriminalis yang semakin bertambah juga begitu pun sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan fenomena yang terjadi pada Kabupaten Tapanuli Utara. Pengangguran cenderung menurun setiap tahunnya dan kejahatan malah semakin meningkat. Fenomena ini tidak sejalan dengan (Sari, 2019).



Sumber: (Bps.go.id, 2024)

Gambar 1: Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah dalam keluar dari resesi dalam hal lapangan kerja adalah analisis tinggi rendahnya tingkat pengangguran yang dipublikasikan. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) menurun dari tahun 2016 ke tahun 2022 (Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, 2020). TPT pada tahun 2016 sebesar 5,84% tahun 2022 yaitu 1,07%. TPT terendah terdapat di tahun 2014 dengan angka pengangguran sebesar 0,59%.



Sumber: (Bps.go.id, 2024)

Gambar 2. Tingkat Kriminal Kabupaten Tapanuli Utara 2018-2022

Tingkat kriminalitas adalah perbuatan dilakukan yang menimbulkan dan membuat keresahan bagi masyarakat. Tingkat kriminal di kabupaten mengalami fluktuatif di tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya 37,73 menjadi 33,65.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas peneliti tertarik dalam menganalisis laporan keuangan agar mengetahui kinerja keuangan agar menjadi acuan untuk peneliti-peneliti berikutnya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini mampu diperkirakan untuk membandingkan realisasi total keseluruhan PAD dengan total keseluruhan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka daerah tersebut sudah bisa dikatakan mandiri karna kontribusi Masyarakat sudah cukup besar dalam meningkatkan PAD. (Halim, 2012). Rumus perhitungannya adalah :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Realisasi total pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Tingkatan(%)	Tolak ukur	
	Kapasitas Moneter	Pola Hubungan
0% - 25%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah Sekali	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Parsipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Skala otonomi keuangan daerah meningkat seiring dengan meningkatnya otonomi keuangan daerah. (Abdul Halim, 2012)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini mencerminkan kapasitas pemerintah lokal dalam mencapai PAD sehubungan dengan tujuan yang telah ditentukan dan diidentifikasi sebelumnya. Tujuan ini jelas mempertimbangkan potensi dan kemampuan riil daerah. Indeks efisiensi PAD dihitung dengan membandingkan penjualan PAD yang dicapai dengan penjualan PAD yang dicapai relatif terhadap target. (Mahmudi, 2016). Rumus perhitungannya adalah :

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Total pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tolak ukur	
Ketergantungan (%)	Kapasitas Moneter
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Semakin tinggi tingkatannya maka semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. (Mahmudi, 2016)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini merupakan laporan yang menjelaskan hubungan antara jumlah pendapatan yang dapat diperoleh dalam jangka pendek dengan peluang memperoleh pendapatan tersebut. Kinerja pelaporan laba rugi suatu kota dianggap efisien jika tingkat keberhasilannya < 100% atau < 10%. Semakin rendah efisiensi maka semakin baik kemampuan pemerintah lokal. Rumus perhitungannya yaitu :

$$\text{Rasio derajat desentralisasi} = \frac{\text{Biaya perolehan}}{\text{Realisasi PAD+Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tolak ukur	
Tingkatan	Keterangan
0 -10%	Rendah Sekali
10 - 30%	Rendah
31- 40%	Cukup
41 - 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Kemampuan pemerintah daerah untuk mengadopsi desentralisasi meningkat dengan kontribusi PAD (Bisma & Susanto, 2010).

Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini mencerminkan kinerja pemerintah lokal untuk menghasilkan PAD berdasarkan rencana dan menetapkan sasaran sesuai kemampuan daerah ril. Rasio ini aktivitas untuk menilai perluasan aktivitas bermanfaat melalui perumahan lokal. Rasio efisiensi wilayah PAD Perumandi Sekekan Kepinan dalam menggerakkan Yayasan PAD mendapat perhatian khusus (Mahmudi, 2016). Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tolak ukur	
Tingkat Efektifitas (%)	Kapasitas Moneter
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif

< 75

Tidak Efektif

Tingkat Efektivitas PAD mengukur kemampuan perangkat daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan tujuannya (Mahmudi, 2016)

Rasio Efisiensi PAD

Rasio ini diukur dengan membandingkan biaya perolehan PAD dengan realisasi PAD. (Mahmudi, 2016) Semakin rendah rasio ini maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah lokal untuk menghimpun anggaran daerah (Halim, 2012). Rumus perhitungannya adalah :

$$\text{Rasio efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya perolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD (pajak daerah + retribusi daerah)}} \times 100\%$$

Tolak ukur

Tingkat Keefisienan (%)	Kapasitas Moneter
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Penyelenggara daerah lebih efektif dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah ketika nilai skala ini lebih kecil (Abdul Halim, 2012)

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio ini merupakan rasio yang dapat menjelaskan kinerja suatu daerah untuk mencapai pajak daerah yang sudah ditentukan dan dapat membandingkan anggaran yang ditentukan sesuai kemampuan sebenarnya dari daerah tersebut. (Abdul Halim, 2012). Rumus perhitungannya :

$$\text{Rasio efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Pajak daerah}} \times 100\%$$

Tolak ukur

Tingkat Efektivitas (%)	Kapasitas Moneter
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Kapasitas pemerintah daerah untuk memobilisasi pendapatan PAD sesuai dengan anggarannya meningkat seiring dengan peningkatan tingkatan. (Mahmudi, 2016)

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Suatu operasi dianggap efisien jika suatu produk diproduksi dengan menggunakan sumberdaya dan dana sedikit mungkin. Efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Output adalah realisasi pendapatan lokal (Mahsun, 2014). Kegiatan pemerintah lokal dalam memungut pajak daerah dianggap produktif jika kuota yang diharapkan < 10%, atau jika kuota lebih rendah dari kuota maka kuota lebih baik. Rumus perhitungannya :

$$\text{Rasio efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya pemungutan pajak daerah}}{\text{Realisasi pajak daerah}} \times 100\%$$

Tolak ukur

Keefisienan (%)	Kapasitas Moneter
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Dapat dikatakan bahwa kinerja administrator daerah otonom lebih baik atau lebih efisien jika kinerjanya 10% atau kurang di bawah rata-rata. (Mahsun, 2019)

Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Besarnya kontribusi BUMD, maka dorongan terakhir PAD adalah mengoptimalkan potensi alam yang ada di sekitar wilayah pemerintahan lokal untuk membenarkan BUMD. Semakin besar BUMD yang dilatih maka mereka diharapkan bisa berkontribusi terhadap PAD-nya, namun kenyataannya memang begitu. Permasalahannya, banyak pemerintah lokal yang masih tidak optimal dalam mengelola BUMD, sehingga terlihat bahwa dividen dari keuntungan BUMD rata-rata sangat rendah, sehingga PAD juga sangat rendah. rendah, hal ini menyebabkan pemerintah lokal kurang mampu dalam memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar daerahnya tersebut, sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Siswanto & Maylani, 2022), yang berpendapat bahwa besarnya kontribusi BUMD adalah masih cukup besar. namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilaksanakan (Tanan & Duri, 2018) bahwa kontribusi BUMD terhadap Kota Jayapura masuk kategori tergolong kecil, sedangkan menurut (Sosial, 2012)(Juwita et al., 2021) kontribusi BUMD terhadap kota Surakarta relatif baik. Rumus perhitungan :

$$\text{Rasio derajat kontribusi BUMD} = \frac{\text{Laba BUMD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. METODE PENELITIAN

Kajian data yang dibuat untuk riset ini merupakan analisis rasio keuangan dengan topik penelitian dengan kata lain laporan keuangan pemerintah lokal kabupaten Tapanuli Utara di tahun 2013-2022. Riset ini merupakan riset deskriptif kuantitatif sesuai topik Riset informasi Finansial pemerintah lokal selama tahun 2013-2021, dan objek riset informasi Realisasi Anggaran, Neraca, dan Informasi Rincian Penerimaan PAD Kabupaten. Yang dimaksud dengan Teknik pengumpulan data disini adalah dokumentasi. Kemudian menganalisis laporan keuangan dan menghitung rasio-rasio yang ada, serta akan dijelaskan dengan kalimat dan gambar yang mampu untuk memperkuat informasi yang sudah ada. Data yang telah dibuat di penelitian ini merupakan laporan keuangan pemerintah lokal kabupaten Tapanuli Utara 2013-2022.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3. Rasio Kemandirian

Tahun	Realisasi Total PAD	Pendapatan transfer (Rp)	Rasio	Kapasitas Moneter	Pola Hubungan
2013	37.954.419.661,95	761.663.073.336,00	4,98%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2014	63.696.097.398,86	780.637.089.042,00	8,15%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2015	82.753.547.210,86	1.034.436.635.991,00	7,99%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2016	94.783.154.638,45	1.089.907.820.341,00	8,69%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2017	162.441.906.093,04	1.055.355.673.355,00	15,30%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2018	105.656.762.964,31	1.125.786.207.318,00	9,38%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2019	113.990.753.581,35	1.124.312.757.921,00	10,13%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2020	133.375.094.965,44	1.078.788.903.404,00	12,36%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2021	162.791.620.432,20	1.178.811.365.743,00	13,80%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2022	154.965.471.085,70	1.144.667.163.798,00	13,53%	Sangat rendah sekali	Instruktif
Rata-rata	111.240.882.803,22	1.037.436.669.024,90	10,43%	Sangat rendah sekali	Instruktif

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Hasil penelitian yang disajikan menunjukkan bahwa rasio ini cenderung mengalami peningkatan, dimana rasio terendah berada di tahun 2013 sebesar 4,98% dan rasio tertinggi yaitu 2017 sebesar 15,39%. Lalu pada 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 6,01% dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan nilai rasio kemandirian yaitu dari 8,69% menjadi 15,39% terjadi peningkatan sebesar 6,7%. Meskipun nilai rasio kemandirian terkadang mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan, tetapi rerata rasio ini tergolong sangat rendah atau dalam pola hubungan instruktif. (Kemandirian et al., 2024)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Total pendapatan asli daerah	Total pendapatan daerah	Rasio	Kapasitas Moneter
2013	37.954.419.661,95	852.236.053.191,95	4,45%	Rendah sekali
2014	63.696.097.398,86	873.193.145.520,86	7,29%	Rendah sekali
2015	82.753.547.210,86	1.117.190.183.201,86	7,40%	Rendah sekali
2016	94.783.154.638,45	1.197.874.974.979,45	7,91%	Rendah sekali
2017	162.441.906.093,04	1.221.109.579.448,04	13,30%	Rendah sekali
2018	105.656.762.964,31	1.290.537.707.622,31	8,18%	Rendah sekali
2019	113.990.759.581,50	1.333.001.122.805,50	8,55%	Rendah sekali
2020	113.375.094.965,44	1.290.868.909.824,44	8,78%	Rendah sekali
2021	162.791.620.432,40	1.418.077.322.328,40	11,47%	Rendah sekali
2022	154.965.471.085,70	1.311.206.689.495,70	11,81%	Rendah sekali
Rata-rata	103.329.658.659,94	1.198.678.389.468,52	8,91%	Rendah sekali

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Riset menunjukkan bahwa rasio cenderung mengalami peningkatan, dan tertinggi pada 2017 yaitu sebesar 13,3% dan yang terendah pada 2013 yaitu sebesar 4,45%. Walaupun rasio ini terus mengalami peningkatan, namun rerata rasio ini masi tergolong rendah sekali. (Farida & Nugraha, 2019)

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Total pendapatan asli daerah	Total pendapatan daerah	Rasio	Kapasitas Moneter
2013	37.954.419.661,95	761.663.073.336,00	4,98%	Rendah sekali
2014	63.696.097.398,86	780.637.089.042,00	8,15%	Rendah sekali
2015	82.753.547.210,86	1.034.436.635.991,00	7,99%	Rendah sekali
2016	94.783.154.638,45	1.089.907.820.341,00	8,69%	Rendah sekali
2017	162.441.906.093,04	1.055.355.673.355,00	15,39%	Rendah
2018	105.656.762.964,31	1.125.786.207.318,00	9,38%	Rendah sekali
2019	113.990.753.581,35	1.124.312.757.921,00	10,13%	Rendah
2020	133.375.094.965,44	1.078.788.903.404,00	12,36%	Rendah
2021	162.791.620.432,20	1.178.811.365.743,00	13,80%	Rendah
2022	154.965.471.085,70	1.144.667.163.798,00	13,53%	Rendah
Rata-rata	111.240.882.803,22	1.037.436.669.024,90	10,63%	Rendah

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Semakin besar keterlibatan PAD maka semakin bertambah usaha pemerintah lokal dalam menerapkan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio tingkat desentralisasi keuangan di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2013-2022 cenderung meningkat setiap tahunnya, dimana rasio tertinggi berada pada 2017 sebesar 15,39% dan pada tahun 2013 sebesar 4,98%. Tahun 2014, tingkat desentralisasi keuangan meningkat, khususnya dari 4,98% menjadi

8,15. %, meningkat 3,17 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun nilai rasio ketergantungan terus meningkat, Tetapi rerata rasio inisasi tergolong rendah.

4. Rasio Efektivitas PAD

Tabel 6. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Kapasitas moneter
2013	37.954.419.661,95	37.560.110.664,00	101,04%	Sangat Efektif
2014	63.696.097.398,86	48.631.943.204,00	130,97%	Sangat Efektif
2015	82.753.547.210,86	71.442.031.599,00	115,83%	Sangat Efektif
2016	94.783.154.638,45	92.997.947.710,00	101,91%	Sangat Efektif
2017	162.441.906.093,04	158.067.279.858,00	102,76%	Sangat Efektif
2018	105.656.762.964,31	115.160.302.201,00	91,74%	Cukup efektif
2019	113.990.753.581,35	123.751.151.531,00	92,11%	Cukup efektif
2020	133.375.094.965,44	103.038.584.850,00	129,44%	Sangat Efektif
2021	162.791.620.432,20	128.523.313.999,80	126,66%	Sangat Efektif
2022	154.965.471.085,70	172.558.357.397,00	89,80%	Kurang Efektif
Rata-rata	111.240.882.803,22	105.173.102.301,38	108,23%	Sangat Efektif

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Hasil penelitian menunjukkan rasio ini cenderung berubah uabah atau tidak. Rasio PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 89.804% dan rasio terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 101,04%.. Dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas PAD Kabupaten Tapanuli Utara tergolong dalam Kapasitas Moneter yang baik.

5. Rasio Efisiensi PAD

Tabel 7. Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Biaya perolehan	Realisasi PAD + retribusi daerah	Rasio	Kapasitas Moneter
2013	518.548.477,00	23.660.907.880,00	2,19	Sangat Efisien
2014	784.142.786,00	47.448.331.617,23	1,65	Sangat Efisien
2015	800.073.807,00	47.736.072.922,20	1,68	Sangat Efisien
2016	1.080.842.897,00	57.970.358.885,94	1,86	Sangat Efisien
2017	795.077.918,00	62.017.363.695,95	1,28	Sangat Efisien
2018	546.975.889,00	22.062.765.162,35	2,48	Sangat Efisien
2019	681.797.024,00	25.779.572.005,45	2,64	Sangat Efisien
2020	860.454.803,00	24.279.655.062,66	3,54	Sangat Efisien
2021	989.966.669,00	27.174.763.713,00	3,64	Sangat Efisien
2022	1.163.665.855,00	34.548.271.967,36	3,37	Sangat Efisien
Rata-rata	822.154.612,50	37.267.806.291,21	2,43	Sangat Efisien

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ini mengalami perubahan yang tidak beraturan dari tahun ke tahun atau tidak stabil Dimana rasio tertinggi berada pada 2021 sebesar 3,64% dan terendah berada pada 2017 sebesar 1,28%. Walaupun rasio ini belum dapat dipastikan, namun rerata rasio efisiensi PAD di Kabupaten

Tapanuli Utara sebesar 2,43% termasuk dalam kategori Kapasitas Moneter Sangat Efisien.

6. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Tabel 8. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi pajak daerah	Pajak daerah	Rasio	Kapasitas moneter
2013	6.024.675.998,00	4.559.125.728,00	132,14%	Sangat Efektif
2014	11.286.218.960,23	8.122.686.000,00	138,94%	Sangat Efektif
2015	9.599.737.353,20	8.150.579.223,00	117,77%	Sangat Efektif
2016	12.862.246.705,44	11.440.181.766,00	112,43%	Sangat Efektif
2017	14.229.820.630,70	15.730.000.000,00	90,46%	Cukup Efektif
2018	17.621.282.629,57	24.896.060.566,00	70,77%	Tidak Efektif
2019	21.200.901.649,00	25.286.201.045,00	83,84%	Kurang Efektif
2020	19.678.100.705,83	13.425.585.064,50	146,57%	Sangat Efektif
2021	21.703.779.853,00	19.167.598.082,00	113,23%	Sangat Efektif
2022	27.198.848.606,86	28.098.797.351,00	96,79%	Cukup Efektif
Rata-rata	16.140.561.309,18	15.887.681.482,55	110,29%	Sangat efektif

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ini cenderung berubah ubah setiap tahunnya. Dimana rasio tertinggi berada pada 2022 yaitu sebesar 96,797%. Dan terendah berada pada 2013 sebesar 132,14%. Rerata rasio ini termasuk dalam ketegori Kapasitas moneter Sangat Efektif.

7. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tabel 9. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya pemungutan pajak daerah	Realisasi pajak daerah	Rasio	Kapasitas Moneter
2013	387.835.288,00	4.559.125.728,00	8,50%	Sangat Efisien
2014	550.621.117,00	8.122.686.000,00	6,77%	Sangat Efisien
2015	306.347.917,00	8.150.579.223,00	3,75%	Sangat Efisien
2016	526.163.402,00	11.440.181.766,00	4,59%	Sangat Efisien
2017	432.313.444,00	15.730.000.000,00	2,74%	Sangat Efisien
2018	500.721.463.121,04	24.896.060.566,00	1,37%	Sangat Efisien
2019	508.112.651.090,00	25.286.201.045,00	2,48%	Sangat Efisien
2020	491.483.123.408,00	13.425.585.064,50	5,14%	Sangat Efisien
2021	521.578.901.088,90	19.167.598.082,00	4,10%	Sangat Efisien
2022	511.725.220.276,00	28.098.797.351,00	3,10%	Sangat Efisien
Rata-rata	253.582.464.015,19	15.887.681.482,55	4,25%	Sangat Efisien

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK), 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ini cenderung mengalami kondisi yang tidak menentu/berfluktuasi. Ttarif efektif pajak daerah terendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 1,37% dan nilai tarif efektif pajak daerah tertinggi terdapat di 2013

dengan tarif sebesar 8,50%. Rerata efisiensi pajak di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara berada dalam kategori Kapasitas Moneter Sangat efisien.

8. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tabel 10. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Laba BUMD	Realisasi PAD	Rasio
2013	7.195.245.251,00	37.954.419.661,95	18,95%
2014	4.481.772.418,00	63.696.097.398,86	7,03%
2015	7.442.520.126,00	82.753.547.210,86	8,99%
2016	9.499.944.717,00	94.783.154.638,45	10,02%
2017	8.548.722.253,00	162.441.906.093,04	5,26%
2018	9.467.966.635,00	105.656.762.964,31	8,965
2019	8.024.092.439,00	113.990.759.581,50	7,03%
2020	7.557.286.367,00	113.373.094.965,44	6,66%
2021	6.961.082.639,00	162.791.620.432,40	4,27%
2022	8.283.046.458,00	154.965.471.085,70	5,34%
Rata-rata	7.746.167.930,30	109.240.683.403,25	8,251%

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara (BPK), 2024)

Rasio ini membantu mengetahui keterlibatan perusahaan lokal dalam menunjang PAD. Rasio ini diperkirakan dengan membandingkan pendapatan pengelolaan aset daerah dengan jumlah (Mahmudi, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan BUMD di Kabupaten Tapanuli Utara tidak stabil pada tahun 2013 hingga tahun 2022. Tingkat keterlibatan BUMD paling besar berlangsung pada tahun 2013 yaitu sebesar 18,95% dan terkecil pada tahun 2021 dalam setahun. . menilai 4,27%. Dapat dikatakan tingkat kontribusi BUMD Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2013-2022 sudah baik.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Tapanuli diperoleh gambaran bahwa tingkat PAD meningkat setiap tahunnya dari 2013-2017 begitu pula dengan angka rasio yang berbanding lurus dengan tingkat PAD meskipun PAD mengalami peningkatan dari 2013-2017 hal ini tidak mampu merubah kategori rasio kemandirian untuk berpindah ke angka yang lebih baik, ditahun 2018 tingkat PAD menurun dan meningkat kembali ditahun 2019-2021, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan, artinya rendahnya tingkat kemampuan keuangan pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan tidak adanya partisipasi masyarakat yang signifikan dalam pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan bagian utama PAD. Hasil riset (Wasil et al., 2020) semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah, begitu pula sebaliknya semakin kecil pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin kecil Tingkat kemandirian keuangan daerah. Maka rasio kemandirian Kabupaten Tapanuli Utara sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wasil et al., 2020).

Rasio ketergantungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap dana transfer pada tahun 2013-2022 masuk dalam kategori kapasitas moneter rendah sekali dengan rata-rata 8,91%. Yang artinya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan pendanaan pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini masih harus dibiayai dari hasil dana transfer/pusat. Meskipun tercatat dalam laporan keuangan

pemerintah dana PAD meningkat. Maka penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mahmudi, 2016)

Rasio desentralisasi pada Kabupaten Tapanuli Utara dalam kategori rendah. Kabupaten Tapanuli Utara dalam kapasitas moneter dapat dikatakan rendah dengan rerata rasio 10,63%. Maka penelitian ini sejalan dengan (Muttaqin & Akbar, 2023) yang mengatakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Yang artinya rasio desentralisasi derajat Kabupaten Tapanuli Utara belum mampu dalam menggali, mengelola dan mengatur keuangan daerah sendiri sebagai daerah otonom.

Efektivitas dan Efisiensi PAD yang dalam kategori sangat efektif dan efisien yaitu sebesar 110,29% . Artinya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah cukup optimal dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah, karena pajak daerah dan retribusi daerah masuk dalam unsur yang terlibat pada PAD. Semakin tinggi rasio efektivitas artinya kemampuan daerah sangat baik dan semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja perusahaan semakin baik juga. Penelitian ini sejalan dengan (Pramono, 2014)

Kontribusi BUMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013-2022 dengan rerata 8,25% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kontribusi BUMD meningkat . Kontribusi BUMD Kabupaten Tapanuli Utara dari 2013-2022 belum stabil atau masih mengalami perubahan setiap tahunnya (fluktuatif). Kontribusi BUMD dalam meningkatkan perekonomian daerah belum sesuai atau belum optimal. BUMD yang seharusnya menjadi sumber PAD belum bisa dikatakan daerah mandiri secara fiskal. Yang sebenarnya bahwa perekonomian daerah masih membutuhkan dana yang masuk dari pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022)

5. KESIMPULAN

Hasil perhitungan dari rasio-rasio yang ada menunjukkan rasio kemandirian dengan rerata sebesar 10,43% sehingga dapat dikatakan tingkat kemandirian tergolong sangat rendah sekali. Rasio ketergantungan menunjukkan rerata sebesar 8,91% sehingga dikatakan tingkat ketergantungan masih dalam kategori sangat menurun. Rasio derajat desentralisasi fiskal menggambarkan rata-rata dengan nilai 10,63% sehingga dapat dikatakan masuk dalam kategori rendah. Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa rerata rasio ini sebesar 108,23% sehingga dikatakan bahwa tingkat efektivitas PAD masih tergolong sangat efektif. Rasio efisiensi menggambarkan nilai rata-rata cukup tinggi yaitu 98,07% sehingga dapat dikatakan bahwa sangat tidak efisien. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan rerata yang cukup tinggi sebesar 110,29% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah masuk dalam kategori tidak baik. Rasio efisiensi pajak daerah menunjukkan rerata sebesar 4,25% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah termasuk efektif. Rasio derajat kontribusi BUMD menunjukkan rerata sebesar 8,25% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kontribusi BUMD mengalami peningkatan. Dengan hasil yang sudah didapat, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak bisa dikatakan ideal.

Sebaiknya pemerintah lokal berusaha untuk mengelola dan membangun potensi Kabupaten Tapanuli Utara yang berpengaruh cukup besar baik bagi masyarakat terutama dalam bidang pariwisata dan pertanian. Jika pengelolaan kemampuan lokal berhasil, maka pajak daerah memiliki peran penting untuk PAD yang mampu memanfaatkan program yang membangun PAD, peningkatan ketertiban dalam dana transfer, meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan aset daerah dengan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Penerbit Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara (BPK). (2024). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)*.
- Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Bps.go.id. (2024). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk umur 15 tahun keatas menurut Kab/kota (persen).2013-2022*. Bps.Go.Id.
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Juwita, A. H., Prasetyani, D., & Sari, V. K. (2021). *Analisis kebutuhan daerah untuk pembentukan bumd pariwisata*. 23(4), 663–668.
- Kabupaten samosir satahi- saoloan. (2024). *Sejarah singkat Kabupaten samosir*. <https://samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir/#:~:text=Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli,Silindung%2C Toba Holbung%2C Humbang%2C>
- Kemandirian, R., Daerah, K., Fiskal, D. D., & Daerah, E. P. (2024). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Digital Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Pasal 2 Tentang Pelaporan Keuangan dan bagaimana cara memahami laporan keuangan , bagaimana cara menafsirkan angka-angka dalam*. 14–23.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Muttaqin, I., & Akbar, F. S. (2023). *Gezza Insan Muttaqin, 2 Fajar Syaiful Akbar*. 03(01), 20–40. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
- Sari, J. (2019). Analisis Pengaruh tingkat pengangguran dan kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di kecamatan jabung,lampung timur ditinjau dari nilai-nilai ajaran islam [Universitas islam negeri raden intan lampung]. In *Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung*. <https://doi.org/10.4324/9781351010245>
- Sekretariat kabinet republik indonesia. (2022). *Tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) dalam penongkatan perekonomian Daerah*. Humas. <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/>
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Sosial, P. K. (2012). *Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Economic Growth And Sosial Welfare)*. 17(200).
- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). *Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura) dengan kinerja dari pemerintah daerah dalam mengelola*

- keuangannya secara baik . Seperti. 6(September), 91–101.*
- Undang-undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia tentang pemerintah daerah (Nomor 32 tahun 2004).*
- Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 99–109. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441>